

Judul : Korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto Bersiap Mundur
Tanggal : Sabtu, 02 Desember 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 2

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Setya Novanto Bersiap Mundur

JAKARTA, KOMPAS — Tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik, Setya Novanto, berencana mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Sementara itu, di internal Partai Golkar, makin kuat desakan agar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari ketua umum Partai Golkar yang baru digelar paling lambat 15 Desember ini.

Perihal rencana pengunduran diri Novanto dari semua jabatannya itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Melky Laka Lena. "Pak Novanto masih mencari momentum yang pas untuk menyampaikannya (pengunduran diri)," kata Melky saat dihubungi, Jumat (1/12).

Rencana Novanto mengundurkan diri, ujar Melky, belum disampaikan resmi dan tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Namun, Novanto sudah memberi tahu secara lisan sejumlah orang dekatnya di internal Partai Golkar. Novanto juga telah menyampaikan rencananya kepada Mahka-

mah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat saat diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik kedewanan Kamis lalu.

Melky mengatakan, Novanto memutuskan mengundurkan diri karena desakan yang sangat kuat, baik dari internal partai, DPR, maupun publik, agar ia mundur dari jabatannya lantaran sudah berstatus tersangka dan tahanan kasus korupsi. "Kata Pak Novanto, 'Saya tahu kapan saya harus maju dan kapan harus mundur sebagai ketua (ketua umum) dan Ketua DPR,'" ujar Melky.

Sebelum ini, Novanto sempat menolak mundur atau diberhentikan dari posisi Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Pada 21 November lalu, Novanto menulis surat dari rumah tahanan KPK yang isinya meminta agar DPP Partai Golkar dan DPR tidak menyelenggarakan rapat untuk menurunkan dirinya dari jabatan karena ia tengah mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Saat itu, rapat pleno DPP Partai Golkar dan rapat konsul-

tasi fraksi-fraksi di DPR akhirnya tidak jadi memberhentikan Novanto dari jabatannya.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menilai rencana Novanto untuk mundur itu sebagai langkah yang kondusif dan baik untuk partai.

Munaslub

Desakan di internal Partai Golkar semakin kuat agar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) segera diadakan. Kini sudah 31 dari 34 DPD Partai Golkar tingkat provinsi yang mendesak munaslub diselenggarakan sebelum 15 Desember.

Politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan, rapat pleno DPP Partai Golkar untuk membahas desakan dan rencana penyelenggaraan munaslub akan diadakan Senin (4/12). Dalam rapat itu juga akan diputuskan perihal urusan teknis munaslub, seperti waktu dan lokasi penyelenggaraan. "Munaslub akan diadakan di Jakarta, selambat-lambatnya sebelum 15 Desember," kata Yorrys. (AGE/APA/INA/NDY)